

Koalisi Besar dan Masa Depan Oposisi

dalam Politik Indonesia



Oleh
Rudy C Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng: **Politik Anggaran Daerah dan Ketergantungan
Fiskal pada Pemerintah Pusat**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

KOALISI BESAR DAN MASA DEPAN OPOSISI DALAM POLITIK INDONESIA

Koalisi besar adalah salah satu paradoks paling menarik dalam demokrasi Indonesia kontemporer. Di satu sisi, ia tampak menjanjikan stabilitas. Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, presiden memang membutuhkan dukungan legislatif yang cukup agar agenda pemerintahan tidak terjebak dalam kebuntuan. Namun di sisi lain, ketika hampir semua partai besar berhimpun di sekitar pemerintah, pertanyaan mendasarnya menjadi sangat serius: siapa yang akan melakukan pengawasan secara efektif, mengoreksi arah kebijakan, dan menyiapkan alternatif kekuasaan yang kredibel? Pertanyaan inilah yang membuat isu "koalisi besar dan masa depan oposisi" bukan sekadar persoalan taktik elite, melainkan persoalan kualitas demokrasi itu sendiri. Kerangka akademik tentang *coalitional presidentialism* menunjukkan bahwa koalisi luas memang dapat membantu presiden mengelola hubungan eksekutif-legislatif dalam sistem multipartai, tetapi literatur tentang "party cartelization" juga menegaskan bahwa pembagian kekuasaan yang terlalu luas dapat menumpulkan oposisi dan melemahkan akuntabilitas demokratis. ([BINUS Journal](#))

Situasi Indonesia pasca-Pemilu 2024 memperlihatkan paradoks itu dengan sangat jelas. Berdasarkan penetapan hasil Pileg DPR 2024 yang dibacakan KPU, delapan partai lolos ke DPR: PDI Perjuangan 110 kursi, Golkar 102, Gerindra 86, NasDem 69, PKB 68, PKS 53, PAN 48, dan Demokrat 44. Beberapa bulan kemudian, Reuters melaporkan bahwa Prabowo Subianto berhasil mengamankan mayoritas parlemen setelah NasDem menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru. Pada

Februari 2025, Reuters bahkan menyebut PDI-P sebagai satu-satunya partai oposisi di parlemen yang berada di luar koalisi pemerintahan. Dengan kata lain, bukan hanya pemerintah memiliki dukungan yang besar; ruang oposisi parlementer juga menyempit secara drastis. ([detiknews](#))

Bentuk paling nyata dari koalisi besar itu terlihat pada susunan Kabinet Merah Putih. Reuters mencatat kabinet Prabowo memiliki 48 kementerian dan lebih dari 100 menteri serta wakil menteri. Daftar resmi Sekretariat Kabinet menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh dari berbagai poros politik diakomodasi dalam pemerintahan, termasuk Abdul Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono di posisi-posisi strategis. ISEAS-Yusof Ishak Institute menyebut dukungan besar di belakang pemerintahan Prabowo sebagai "permanent coalition" yang juga kerap digambarkan sebagai "political cartel", sementara PDI-P dinyatakan bukan bagian maupun pendukung koalisi tersebut. Kombinasi kabinet yang sangat gemuk, akomodasi lintas-partai, dan minimnya oposisi formal itulah yang menjadi konteks pembahasan masa depan oposisi Indonesia hari ini. ([Reuters](#))

Secara teoritis, koalisi besar dalam sistem presidensial multipartai tidak lahir dari ruang hampa. Literatur *coalitional presidentialism* menunjukkan bahwa presidensialisme dalam masyarakat multipartai sering kali mengandung risiko benturan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, presiden cenderung menggunakan "perangkat kepresidenan" berupa pembagian portofolio, patronase, dan pengelolaan koalisi untuk memastikan stabilitas. Dalam perbandingan Indonesia dan Filipina, riset di *Journal of ASEAN Studies* menunjukkan Jokowi mengelola dukungan legislatif terutama melalui pembentukan koalisi yang luas dan integrasi lawan politik ke dalam kabinet. Artinya, koalisi besar tidak selalu identik dengan penyimpangan; ia dapat dibaca sebagai adaptasi institusional terhadap fragmentasi partai. Masalahnya muncul ketika strategi yang semula dimaksudkan untuk mencegah kebuntuan berubah menjadi

mekanisme permanen untuk menghilangkan kompetisi politik yang berarti. ([BINUS Journal](#))

Di sinilah pembacaan Dan Slater menjadi relevan. Ia menulis bahwa demokrasi tanpa oposisi yang jelas adalah sesuatu yang paradoksal sekaligus problematis, sebab daya tanggung jawab demokrasi sangat bergantung pada kompetisi partai dan ancaman pergantian kekuasaan. Bila hampir semua partai memilih masuk pemerintahan, maka pemilu tidak sungguh-sungguh menyingkirkan pihak yang kalah dari kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, Slater menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan yang terlalu luas membuat partai-partai yang menurun popularitasnya tetap bertahan di kantor-kantor kekuasaan, sehingga akuntabilitas vertikal terhambat baik secara retrospektif maupun prospektif. Dengan kata lain, masalah koalisi besar bukan semata-mata bahwa pemerintah menjadi kuat, tetapi bahwa pemilih kesulitan mengidentifikasi siapa yang harus dipuji, siapa yang harus disalahkan, dan siapa yang sungguh-sungguh menawarkan alternatif. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

Dari sudut pandang pemerintahan, tentu ada argumen kuat yang membela koalisi besar. Koalisi luas membuat proses legislasi dan penganggaran relatif lebih lancar. Reuters mencatat bahwa mayoritas parlemen akan mempermudah proses legislasi, termasuk persetujuan anggaran. Dalam pilkada serentak 2024, Reuters juga melaporkan bahwa kandidat yang didukung koalisi Prabowo menang di banyak provinsi kunci di luar Jakarta, yang berpotensi memudahkan pelaksanaan agenda nasional karena eksekutor program di daerah selaras dengan pusat. Dalam bahasa manajemen politik, ini menyerupai organisasi besar yang mengurangi friksi internal agar program dapat dijalankan lebih cepat dan konsisten. Untuk presiden yang datang dengan agenda ambisius—pertumbuhan, hilirisasi, pangan, makan bergizi gratis, dan restrukturisasi kebijakan ekonomi—koalisi besar memang menawarkan kapasitas eksekusi yang jauh lebih tinggi. ([Reuters](#))

Keuntungan lain dari koalisi besar adalah peredaman konflik elite. Indonesia memiliki pengalaman panjang ketika polarisasi elite merembes ke masyarakat dan mengganggu stabilitas. Koalisi luas dapat dibaca sebagai upaya menghindari logika “pemenang mengambil semua” yang kerap menimbulkan resistensi. Ada rasionalitas tertentu dalam ajakan persatuan elite setelah pemilu, terlebih dalam masyarakat yang sangat majemuk. Reuters mencatat bahwa bahkan sebelum dilantik, Prabowo menekankan pentingnya persatuan elite dan aktif merangkul partai-partai yang semula berada di pihak lawan. Dalam perspektif tertentu, ini tampak seperti strategi integratif untuk menurunkan ketegangan pasca-kontestasi dan menjaga kesinambungan pemerintahan. ([Reuters](#))

Namun justru pada titik itulah sisi gelapnya bermula. Di atas kertas, DPR memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Situs resmi DPR sendiri menegaskan tiga fungsi itu sebagai inti peran lembaga legislatif. Akan tetapi, ketika mayoritas sangat besar berhimpun di belakang pemerintah, fungsi pengawasan mudah bergeser dari kontrol substantif menjadi pengesahan formal. Artikel di *Jambura Law Review* secara tegas menyatakan bahwa dominasi *fat coalitions* telah menggerus fungsi *checks and balances* DPR dan mereduksi lembaga itu menjadi badan yang sekadar menyetujui usul pemerintah tanpa pengujian berarti. Dengan demikian, problem utamanya bukan hanya absennya oposisi, melainkan devaluasi lembaga representatif itu sendiri. ([DPR RI](#))

Kita dapat memahami bahayanya melalui ilustrasi sederhana. Dalam demokrasi yang sehat, DPR bukan hanya mesin voting. Ia adalah arena tempat kebijakan dipertanyakan sebelum dijalankan, asumsi fiskal diuji sebelum anggaran disahkan, dan konsekuensi sosial dibahas sebelum undang-undang dipukul palu. Bila hampir semua fraksi punya insentif untuk tetap dekat dengan kekuasaan—karena akses jabatan, sumber daya, dan perlindungan politik—maka kritik internal menjadi mahal, sedangkan loyalitas menjadi murah. Abstrak artikel Susanto dan koleganya menekankan bahwa partisipasi dalam koalisi menawarkan

akses pada jabatan publik, pendanaan, dan perlindungan hukum, sedangkan menjadi oposisi tidak memberikan insentif yang setara. Di sini terlihat bahwa masa depan oposisi di Indonesia bukan pertama-tama masalah moralitas elite, tetapi masalah struktur insentif. ([EJURNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO](#))

Perkembangan selama 2024–2026 menunjukkan bahwa ketika oposisi parlementer melemah, perlawanan politik bergeser ke ruang ekstra-parlementer. Pada Agustus 2024, Reuters melaporkan parlemen menangguk rencana revisi undang-undang pemilu setelah protes besar meledak di Jakarta dan kota-kota lain. Pada Februari 2025, gelombang protes “Dark Indonesia” dipimpin mahasiswa menentang pemangkasan anggaran dan kebijakan lain pemerintah. Reuters mencatat protes itu merupakan yang terbesar sejak aksi Agustus 2024. Lalu pada Agustus 2025, protes atas tunjangan anggota parlemen berubah menjadi kerusuhan yang menewaskan sedikitnya lima orang sebelum pemerintah dan partai-partai menyatakan akan memangkas tunjangan tersebut. Rangkaian ini memperlihatkan bahwa ketika saluran koreksi di parlemen mengecil, kanal protes bergeser ke jalan, kampus, media sosial, dan masyarakat sipil. ([Reuters](#))

Fenomena ini sesungguhnya tidak baru. Marcus Mietzner sejak 2017 sudah menyebut masa Jokowi sebagai kombinasi antara konsolidasi elite dan oposisi ekstra-parlementer. Dalam konteks sekarang, pola itu tampak berlanjut dalam bentuk baru. Bukan berarti oposisi hilang; ia hanya berpindah arena. Ia muncul sebagai gelombang mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, komunitas hukum tata negara, media independen, dan warga digital yang menguji legitimasi kebijakan dari luar gedung parlemen. Tetapi oposisi ekstra-parlementer memiliki watak yang berbeda dari oposisi institusional. Ia lebih spontan, lebih episodik, dan sering lebih emosional. Ia bisa efektif menahan satu kebijakan, tetapi belum tentu mampu menyusun alternatif pemerintahan yang utuh. Karena itu, dominannya oposisi di jalan bukan tanda demokrasi sehat;

sering justru pertanda bahwa mekanisme koreksi di dalam institusi formal sedang kurang bekerja. ([The Australian National University](#))

Kasus perdebatan mengenai pilkada langsung pada awal 2026 memberi gambaran yang sangat tajam. Sejumlah laporan media menunjukkan ada dorongan dalam koalisi pemerintah untuk kembali ke mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. *The Jakarta Post* melaporkan bahwa PDI-P menjadi satu-satunya partai yang secara formal menolak penghapusan pilkada langsung, dan kemudian DPR menunda rencana revisi UU Pilkada setelah muncul penolakan publik. Dari sudut pembacaan politik, ini penting karena menunjukkan dua hal sekaligus: pertama, oposisi parlementer yang tersisa dapat menjadi simbolik dan bermakna bila mengambil posisi jelas atas isu demokrasi prosedural; kedua, dukungan masyarakat sipil tetap menjadi faktor penting yang dapat memaksa elite mundur. Dengan kata lain, oposisi yang efektif di masa depan kemungkinan bukan oposisi yang bekerja sendirian di parlemen, melainkan oposisi yang mampu membangun aliansi isu dengan publik. ([The Jakarta Post](#))

Akan tetapi, masa depan oposisi parlementer Indonesia tidak dapat dibahas tanpa menyoroti PDI-P. Secara elektoral, PDI-P tetap partai terbesar di DPR dengan 110 kursi. Secara politik, Reuters pada Februari 2025 menyebutnya sebagai satu-satunya partai oposisi di parlemen. ISEAS juga menegaskan bahwa PDI-P bukan bagian maupun pendukung koalisi besar Prabowo. Dari sini muncul pertanyaan sentral: apakah PDI-P akan memilih menjadi oposisi sungguh-sungguh, atau hanya oposisi sementara yang suatu saat dinegosiasikan kembali ke orbit pemerintah? Pertanyaan itu bukan retorika. Sejarah politik Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan bahwa partai-partai sering berpindah dari oposisi ke koalisi ketika biaya berada di luar kekuasaan dirasa terlalu tinggi. ([detiknews](#))

Prospek PDI-P sebagai oposisi menghadapi peluang sekaligus kendala. Peluangnya terletak pada ukuran partai, sejarah organisasi, jaringan kader, dan kemampuannya menarasikan diri sebagai kekuatan “di luar pemerintah”. Secara teoritis, ketika satu partai besar berdiri di luar koalisi yang gemuk, ia memiliki peluang menjadi titik kumpul ketidakpuasan publik. Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi pada Januari 2025 menyatakan ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu inkonstitusional. Putusan ini berpotensi membuka kompetisi 2029 bagi lebih banyak partai dan kandidat, sehingga keberadaan oposisi dapat memperoleh horizon elektoral yang lebih luas. Oposisi akan lebih hidup bila ada peluang realistis untuk berubah menjadi pemerintah pada pemilu berikutnya. Putusan MK itu, setidaknya secara normatif, memperbesar peluang tersebut. ([MKRI](#))

Namun kendalanya juga besar. Pertama, struktur insentif Indonesia lebih menguntungkan partai yang masuk pemerintahan daripada yang bertahan di luar. Kedua, tingginya popularitas presiden membuat oposisi sulit mencari *issue framing* yang efektif. Reuters melaporkan tingkat persetujuan publik terhadap Prabowo mencapai sekitar 81 persen setelah 100 hari pertama, dan masih 78 persen setahun setelah menjabat meski sudah diwarnai protes mematikan. Ini berarti oposisi tidak cukup hanya mengandalkan kritik normatif; ia harus mampu menghubungkan kritik itu dengan isu yang langsung dirasakan publik, terutama ekonomi, layanan sosial, dan kualitas institusi. Tanpa itu, oposisi mudah dituduh sekadar “berpolitik”, sementara pemerintah tetap menikmati legitimasi populernya. ([Reuters](#))

Ketiga, oposisi juga menghadapi risiko pelemahan organisasi. Reuters melaporkan penangkapan Hasto Kristiyanto pada Februari 2025 dalam kasus suap dan perintangan penyidikan; PDIP menolak tuduhan itu dan menyebutnya bermotif politik, sementara KPK membantah adanya motif politik. Terlepas dari benar-salahnya secara hukum yang harus dihormati melalui proses pengadilan, peristiwa itu jelas punya dampak politik: ia

menyita energi organisasi, menggeser agenda publik, dan membuat oposisi terpaksa sibuk bertahan alih-alih menyerang. Dalam politik, oposisi yang terus berada pada posisi defensif cenderung kehilangan kapasitas membangun narasi kebijakan alternatif. ([Reuters](#))

Keempat, koalisi besar tidak hanya bekerja di pusat, tetapi juga di daerah. Reuters menulis bahwa kandidat-kandidat yang didukung koalisi Prabowo menang di banyak provinsi penting pada pilkada 2024, di luar Jakarta. Artinya, oposisi tidak hanya harus bertarung di DPR, tetapi juga menghadapi ekosistem kekuasaan yang semakin terkoordinasi dari pusat hingga daerah. Ini penting karena oposisi yang ingin bertahan sampai 2029 memerlukan basis subnasional: gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD yang dapat menjadi laboratorium kebijakan, panggung kaderisasi, serta mesin mobilisasi. Tanpa itu, oposisi di pusat akan menjadi wacana tanpa infrastruktur. Jakarta, yang disebut Reuters sebagai pengecualian dari dominasi koalisi, karena itu memiliki arti simbolik yang jauh lebih besar daripada sekadar satu kontestasi lokal. ([Reuters](#))

Selain oposisi partai, masa depan demokrasi Indonesia juga akan bergantung pada kekuatan pengimbang nonpartai. Dalam beberapa tahun terakhir, koreksi terhadap kekuasaan justru sering datang dari Mahkamah Konstitusi, masyarakat sipil, dan tekanan publik. Putusan MK yang membatalkan *presidential threshold* pada 2025 adalah contoh bahwa arena yudisial masih dapat memengaruhi struktur kompetisi politik. Demikian pula, aksi publik pada Agustus 2024 berhasil menahan revisi UU pemilu, dan gelombang protes 2025 memaksa partai-partai meninjau tunjangan anggota DPR. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa masa depan oposisi di Indonesia mungkin berbentuk hibrida: lemah secara formal di parlemen, tetapi tetap hidup melalui kombinasi pengadilan, media, kampus, jalanan, dan jaringan digital. Itu bukan format ideal, tetapi ia merupakan realitas yang harus dibaca dengan jernih. ([MKRI](#))

Akan tetapi, oposisi hibrida juga mengandung risiko. Karena tidak sepenuhnya terinstitusionalisasi, ia mudah terseret ke dalam politik kemarahan tanpa agenda. Di sinilah Indonesia perlu membedakan antara kritik yang menghasilkan koreksi dan sekadar ledakan frustrasi. Protes “Dark Indonesia” memperlihatkan bahwa keresahan publik dapat bersifat luas—mengenai anggaran, layanan sosial, peran militer di ranah sipil, dan masa depan kelas menengah. Sementara AP mencatat amandemen UU TNI 2025 menimbulkan kekhawatiran aktivis pro-demokrasi karena membuka lebih banyak jabatan sipil bagi perwira aktif dan dinilai berisiko mengaburkan batas sipil-militer. Bila isu-isu semacam ini tidak diproses secara memadai di parlemen, maka oposisi akan semakin terkonsentrasi dalam bentuk resistensi sosial. Dalam jangka panjang, resistensi seperti itu dapat memperkaya demokrasi jika disalurkan secara institusional, tetapi dapat pula mendorong siklus ketegangan bila terus-menerus dipaksa bekerja dari luar lembaga. ([Reuters](#))

Dari sini saya melihat setidaknya ada tiga skenario bagi masa depan oposisi Indonesia. Skenario pertama adalah **kooptasi total**. Dalam skenario ini, PDI-P atau bagian penting darinya pada akhirnya juga memilih berdamai secara penuh dengan pemerintah. Jika itu terjadi, Indonesia akan memasuki situasi yang oleh Reuters sudah digambarkan sebagai kemungkinan “tidak ada partai oposisi di parlemen”, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak era pemilihan presiden langsung dimulai pada 2004. Konsekuensinya ialah pengawasan formal makin lemah, pemilih makin sulit membedakan alternatif, dan kompetisi 2029 berisiko menjadi perebutan figur di dalam satu orbit elite yang sama. ([Reuters](#))

Skenario kedua adalah **oposisi terbatas tetapi institusional**. Dalam skenario ini, PDI-P bertahan di luar pemerintah, namun tidak selalu konfrontatif. Ia akan memilih isu-isu tertentu—seperti pilkada langsung, desain kesejahteraan, tata kelola anggaran, atau independensi lembaga—untuk membedakan diri dari pemerintah. Ini mungkin menjadi

jalan paling realistis, sebab ia memungkinkan oposisi tetap ada tanpa harus jatuh ke politik penolakan total. Skenario ini akan lebih sehat bila didukung reformasi kelembagaan yang memberi hak-hak minimum kepada minoritas parlemen, sehingga oposisi tidak hanya hidup karena kemurahan hati mayoritas, tetapi karena aturan main yang melindunginya. ([EJURNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO](#))

Skenario ketiga adalah **melemahnya oposisi partai tetapi menguatnya oposisi sosial**. Ini yang sedang tampak gejalanya. Mahasiswa, serikat, komunitas profesional, jurnalis, kelompok prodemokrasi, dan pengadilan mengambil alih sebagian fungsi koreksi yang seharusnya juga dijalankan parlemen. Bila tren ini berlanjut, Indonesia mungkin tetap terlihat demokratis karena protes dan kritik masih ada, tetapi kualitas demokrasinya menjadi timpang: sangat bising di ruang publik, tetapi kurang efektif di dalam lembaga resmi. Demokrasi seperti ini rawan karena setiap koreksi harus dibayar dengan mobilisasi tinggi, konflik terbuka, dan kadang korban sosial-politik yang tidak kecil. ([Reuters](#))

Karena itu, pembahasan masa depan oposisi tidak boleh berhenti pada pertanyaan "siapa yang menjadi oposisi", tetapi harus bergerak ke "bagaimana oposisi dilembagakan". Artikel di *Jambura Law Review* mengusulkan *Right of the Opposition*: hak minoritas untuk memimpin atau memperoleh porsi strategis dalam alat kelengkapan DPR, hak menunda pembahasan RUU yang kontroversial secara konstitusional, hak memimpin mekanisme pengawasan tertentu, pengaruh dalam pembahasan anggaran, serta dukungan sumber daya penelitian kebijakan. Gagasan semacam ini penting karena demokrasi yang matang tidak menggantungkan hidup oposisi pada belas kasihan penguasa. Oposisi harus dijamin oleh desain kelembagaan, bukan hanya oleh keseimbangan kekuatan sementara. ([EJURNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO](#))

Selain itu, reformasi oposisi di Indonesia juga menuntut perubahan budaya politik. Selama ini, oposisi sering dipandang sebagai tindakan bermusuhan, seolah-olah berada di luar pemerintah berarti tidak nasionalis atau tidak mendukung pembangunan. Padahal dalam demokrasi modern, oposisi yang setia pada konstitusi justru adalah bagian dari pemerintahan yang sehat. Ia bukan musuh negara, melainkan mitra antagonistik yang menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan koreksi. Karena itu, Indonesia membutuhkan normalisasi gagasan bahwa berbeda dari pemerintah bukanlah dosa politik. Perbedaan yang diinstitutionalisasi dengan baik justru menjaga stabilitas lebih lama daripada persatuan semu yang menekan kritik ke bawah tanah. Argumen ini sejalan dengan temuan akademik bahwa ketidakhadiran oposisi yang efektif telah berkontribusi pada kemerosotan kualitas demokrasi dan melemahkan fungsi pengawasan DPR. ([EJURNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO](#))

Ada pula dimensi elektoral yang sangat menentukan. Putusan MK tentang penghapusan *presidential threshold* membuka kesempatan untuk merancang kembali kompetisi 2029 agar lebih terbuka. Bila implementasinya konsisten, partai-partai tidak lagi dipaksa berkoalisi terlalu dini hanya untuk sekadar dapat mengusung calon. Ini dapat menghidupkan kembali diferensiasi programatik dan memberi ruang bagi oposisi untuk tumbuh dari kompetisi yang lebih nyata, bukan dari negosiasi tertutup antarelite. Tetapi peluang itu hanya akan berguna bila diikuti pembenahan lain: pembiayaan partai yang lebih sehat, transparansi kandidasi, penguatan debat kebijakan, dan penolakan terhadap manipulasi aturan pemilu yang merugikan kompetitor. Tanpa itu, pembukaan ambang pencalonan hanya akan menghasilkan lebih banyak kandidat, bukan lebih banyak kualitas demokrasi. ([MKRI](#))

Pada akhirnya, saya melihat bahwa koalisi besar di Indonesia adalah pedang bermata dua. Ia bisa memperkuat kapasitas eksekusi negara, mempercepat koordinasi pusat-daerah, dan menurunkan friksi elite pada

tahap tertentu. Tetapi dalam bentuk yang terlalu dominan, ia juga dapat mengikis pengawasan, mengaburkan akuntabilitas, dan mendorong oposisi keluar dari institusi formal menuju jalanan. Masa depan oposisi Indonesia karenanya tidak hanya ditentukan oleh apakah PDI-P bertahan di luar pemerintahan, melainkan oleh apakah sistem politik Indonesia bersedia mengakui oposisi sebagai komponen sah dari demokrasi. Selama oposisi masih dipandang sebagai anomali, koalisi besar akan terus menggoda elite; dan selama itu pula kualitas *checks and balances* akan bergantung lebih banyak pada keberanian masyarakat sipil daripada pada desain kelembagaan yang mapan. ([ISEAS Yusof Ishak Institute](#))

Kesimpulannya, **masa depan oposisi dalam politik Indonesia belum tertutup, tetapi sedang diuji keras.** Ia tidak lenyap, namun sedang dipaksa beradaptasi dalam lingkungan yang sangat tidak simetris. Dalam jangka pendek, oposisi kemungkinan akan tetap kecil secara parlementer tetapi relatif hidup secara sosial. Dalam jangka menengah menuju 2029, nasibnya akan ditentukan oleh empat hal: kemampuan oposisi membangun isu yang dekat dengan kehidupan publik; keberanian bertahan di luar patronase pemerintah; kesiapan lembaga seperti DPR dan MK menjaga ruang kompetisi; dan kemauan elite untuk menerima bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan persatuan, tetapi juga perbedaan yang diatur secara adil. Jika empat hal itu bergerak ke arah yang sehat, koalisi besar tidak akan membunuh oposisi; ia justru dapat memaksa oposisi menjadi lebih cerdas, lebih programatik, dan lebih relevan. Tetapi jika tidak, Indonesia berisiko memiliki pemerintahan yang sangat kuat di atas kertas, namun semakin rapuh dalam kualitas demokrasi. ([Reuters](#))

[\(Past chat\)](#)[\(Past chat\)](#)[\(Past chat\)](#)[\(Past chat\)](#)

Naskah **makalah akademik format jurnal** yang dikembangkan dari uraian sebelumnya.

KOALISI BESAR DAN MASA DEPAN OPOSISI DALAM POLITIK INDONESIA

Abstrak

Artikel ini membahas implikasi munculnya koalisi besar dalam politik Indonesia pasca-Pemilu 2024 terhadap masa depan oposisi, kualitas demokrasi, dan efektivitas mekanisme *checks and balances*. Dalam sistem presidensial multipartai, pembentukan koalisi luas sering dipandang sebagai strategi rasional untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan kelancaran legislasi. Namun, ketika hampir seluruh partai besar berhimpun di sekitar pemerintah, oposisi formal di parlemen berpotensi melemah, sehingga fungsi pengawasan legislatif mengalami penurunan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis dokumen politik-kebijakan untuk menelaah konfigurasi koalisi besar, insentif elite untuk bergabung dalam pemerintahan, serta perubahan bentuk oposisi dari arena parlementer ke arena ekstra-parlementer. Temuan utama menunjukkan bahwa koalisi besar di Indonesia memberikan keuntungan jangka pendek berupa stabilitas politik, kemudahan koordinasi eksekutif-legislatif, dan penguatan

kapasitas eksekusi kebijakan. Namun, pada saat yang sama, ia menimbulkan biaya demokratis berupa kaburnya garis pembeda antara pemerintah dan oposisi, melemahnya akuntabilitas, serta pergeseran perlawanan politik ke masyarakat sipil, pengadilan, media, dan ruang jalanan. Artikel ini berargumen bahwa masa depan oposisi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keberadaan partai di luar pemerintahan, tetapi oleh sejauh mana sistem politik Indonesia bersedia melembagakan oposisi sebagai unsur sah dalam demokrasi konstitusional. Tanpa penguatan hak-hak oposisi dan pembenahan insentif kelembagaan, koalisi besar berisiko melahirkan demokrasi yang stabil secara prosedural, tetapi rapuh secara substantif.

Kata kunci: koalisi besar, oposisi, demokrasi Indonesia, presidensialisme multipartai, checks and balances

Abstract

This article examines the implications of the emergence of a grand coalition in post-2024 Indonesian politics for the future of opposition, democratic quality, and the effectiveness of checks and balances. In a multiparty presidential system, broad coalitions are often viewed as a rational strategy to ensure governmental stability and smooth legislative processes. However, when almost all major parties cluster around the government, formal parliamentary opposition may weaken, reducing the legislature's oversight function. Using a qualitative approach based on literature review and analysis of political and policy documents, this paper investigates the configuration of the grand coalition, elite incentives to join government, and the shift of opposition from parliamentary to extra-parliamentary arenas. The findings suggest that Indonesia's grand coalition offers short-term benefits such as political stability, easier executive-legislative coordination, and stronger policy execution. At the same time, it generates democratic costs in the form of blurred distinctions between government and opposition, weakened

accountability, and the relocation of political resistance to civil society, courts, media, and street mobilization. This article argues that the future of opposition in Indonesia depends not merely on whether some parties remain outside government, but on whether the political system institutionalizes opposition as a legitimate component of constitutional democracy. Without strengthening opposition rights and correcting institutional incentives, grand coalitions risk producing a democracy that is procedurally stable yet substantively fragile.

1. Pendahuluan

Dalam studi politik modern, oposisi bukan sekadar “lawan pemerintah,” melainkan institusi demokratis yang berfungsi mengawasi kekuasaan, menawarkan alternatif kebijakan, serta menjaga agar sirkulasi kekuasaan tetap terbuka. Demokrasi yang sehat bukan hanya ditandai oleh adanya pemilu yang teratur, melainkan juga oleh hadirnya kompetisi politik yang nyata antara pihak yang memerintah dan pihak yang mengkritik, mengoreksi, dan bersiap menggantikan. Dalam konteks ini, menguatnya fenomena **koalisi besar** dalam politik Indonesia menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah stabilitas politik yang diperoleh dari koalisi besar masih sejalan dengan kebutuhan demokrasi terhadap oposisi yang efektif?

Pasca-Pemilu 2024, konfigurasi politik Indonesia menunjukkan kecenderungan menuju koalisi pemerintahan yang sangat luas. Data hasil Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan delapan partai lolos ke DPR, dengan PDI Perjuangan memperoleh 110 kursi, Golkar 102 kursi, Gerindra 86 kursi, NasDem 69 kursi, PKB 68 kursi, PKS 53 kursi, PAN 48 kursi, dan Demokrat 44 kursi. Dalam perkembangan berikutnya, dukungan beberapa partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto memperlihatkan bahwa mayoritas besar parlemen terkonsolidasi di

belakang presiden terpilih. Bahkan, sejumlah pengamat menggambarkan situasi ini sebagai bentuk "koalisi permanen" atau "kartel politik," yakni suatu pola ketika persaingan elektoral yang seharusnya memunculkan diferensiasi programatik justru berakhir pada pembagian kekuasaan yang luas di antara elite partai.

Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, koalisi luas sering dianggap sebagai kebutuhan praktis. Presiden membutuhkan dukungan legislatif agar agenda pemerintah tidak tersandera oleh fragmentasi partai. Di satu sisi, argumen ini masuk akal. Negara membutuhkan efektivitas pemerintahan, kelancaran legislasi, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Namun, di sisi lain, ketika hampir semua kekuatan politik utama masuk ke dalam orbit pemerintahan, oposisi formal di parlemen menjadi sangat kecil atau bahkan nyaris hilang. Kondisi semacam ini menimbulkan persoalan serius bagi demokrasi, sebab mekanisme pengawasan terhadap eksekutif menjadi lebih lemah, tanggung jawab politik menjadi kabur, dan pemilih semakin sulit mengidentifikasi alternatif pemerintahan.

Fenomena ini penting dibahas karena Indonesia bukan negara otoriter yang meniadakan pemilu, melainkan demokrasi elektoral yang secara formal masih berfungsi. Justru karena itu, problem utamanya bukan terletak pada absennya prosedur demokrasi, tetapi pada melemahnya kualitas substantif demokrasi. Dalam keadaan ketika hampir semua partai besar bergabung dengan pemerintah, parlemen berisiko berubah dari arena deliberasi dan pengawasan menjadi arena legitimasi terhadap kebijakan eksekutif. Kritik tidak hilang, tetapi bergeser dari lembaga formal ke ruang-ruang sosial: mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, media, pengadilan, dan aksi jalanan.

Tulisan ini berangkat dari premis bahwa **koalisi besar di Indonesia adalah fenomena ambivalen**. Ia dapat memberi manfaat berupa stabilitas dan kapasitas eksekusi kebijakan, tetapi juga dapat

menimbulkan biaya demokratis yang tidak kecil. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, mengapa koalisi besar menjadi pilihan rasional dalam politik Indonesia kontemporer? Kedua, bagaimana koalisi besar memengaruhi keberadaan dan efektivitas oposisi? Ketiga, seperti apa kemungkinan masa depan oposisi Indonesia dalam struktur kekuasaan yang makin terkonsolidasi?

Secara akademik, artikel ini penting karena mempertemukan tiga bidang kajian sekaligus: kajian presidensialisme multipartai, teori oposisi demokratis, dan studi mengenai kartelisasi partai. Secara praktis, artikel ini juga relevan bagi perdebatan publik tentang masa depan demokrasi Indonesia, terutama menjelang siklus politik berikutnya. Sebab pertanyaan mendasarnya bukan hanya apakah pemerintah kuat atau lemah, melainkan apakah dalam kekuatan itu masih tersedia ruang koreksi yang memadai.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretik

2.1 Presidensialisme Multipartai dan Rasionalitas Koalisi

Salah satu ciri utama politik Indonesia pasca-Reformasi adalah kombinasi antara sistem presidensial dengan sistem kepartaian yang multipartai. Dalam teori klasik, presidensialisme sering dianggap lebih stabil ketika sistem kepartaiannya sederhana. Namun dalam praktik Indonesia, presiden harus bekerja di tengah konfigurasi partai yang beragam, dengan basis ideologi, jaringan patronase, dan kepentingan elektoral yang berbeda-beda. Kondisi ini menjadikan koalisi sebagai instrumen penting bagi presiden untuk mengamankan dukungan legislatif.

Literatur mengenai *coalitional presidentialism* menjelaskan bahwa dalam sistem seperti ini, presiden cenderung menggunakan pembagian jabatan, alokasi sumber daya, dan negosiasi kebijakan untuk membentuk

mayoritas di parlemen. Koalisi bukan sekadar pilihan, melainkan mekanisme adaptif terhadap fragmentasi. Dalam konteks Indonesia, praktik tersebut telah berkembang sejak masa awal Reformasi dan semakin matang pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto.

Namun, koalisi yang awalnya dimaksudkan untuk membangun pemerintahan efektif dapat berkembang menjadi koalisi yang terlalu luas. Ketika terlalu banyak partai masuk pemerintahan, perbedaan antara "pendukung pemerintah" dan "pengoreksi pemerintah" menjadi kabur. Koalisi yang terlalu besar bukan lagi alat untuk mengelola pemerintahan, melainkan sarana untuk memperluas distribusi kekuasaan di antara elite.

2.2 Oposisi sebagai Unsur Esensial Demokrasi

Dalam teori demokrasi parlementer maupun presidensial, oposisi berfungsi sebagai unsur penting dari akuntabilitas. Oposisi menjaga agar pemerintah tidak bekerja tanpa pengawasan, mengajukan kritik berbasis kebijakan, serta menyiapkan kemungkinan pergantian kekuasaan secara damai. Dalam demokrasi yang matang, keberadaan oposisi tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme koreksi yang sah.

Tanpa oposisi yang jelas, demokrasi menghadapi beberapa risiko. Pertama, pemilih kesulitan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan kebijakan. Kedua, parlemen kehilangan vitalitas deliberatifnya. Ketiga, sirkulasi elite menjadi tertutup karena hampir semua aktor utama berada dalam satu orbit kekuasaan. Dengan demikian, oposisi bukan sekadar kebutuhan etis, melainkan kebutuhan institusional.

2.3 Kartelisasi Partai dan Pelemahan Kompetisi Politik

Konsep *party cartelization* menjelaskan situasi ketika partai-partai politik yang semestinya bersaing justru berbagi akses terhadap negara dan

sumber daya publik. Dalam situasi kartel, partai tidak lagi terutama bersaing untuk menawarkan program yang berbeda, tetapi bekerja sama untuk mempertahankan akses terhadap kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, konsep ini relevan karena banyak partai lebih terdorong untuk bergabung dengan pemerintah daripada mempertahankan posisi oposisi yang keras dan berisiko.

Kartelisasi tidak berarti pemilu berhenti. Pemilu tetap berlangsung, kampanye tetap dilakukan, dan perbedaan simbolik tetap muncul. Namun, setelah pemilu selesai, elite politik cenderung kembali berkumpul dalam pemerintahan. Akibatnya, fungsi pemilu sebagai sarana memilih alternatif kekuasaan menjadi melemah. Inilah salah satu kunci untuk memahami mengapa koalisi besar dapat menjadi persoalan demokratis, meskipun secara formal masih berjalan dalam sistem demokrasi.

3. Metode Penulisan

Artikel ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** berbasis **studi pustaka dan analisis dokumen**. Sumber yang digunakan mencakup hasil resmi pemilu, dokumen lembaga negara, laporan media kredibel, dan kajian akademik terkait presidensialisme multipartai, koalisi, kartelisasi partai, dan oposisi dalam demokrasi Indonesia.

Pendekatan ini dipilih karena fokus tulisan bukan pada pengujian hipotesis statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap dinamika politik, struktur insentif elite, dan implikasi kelembagaan dari koalisi besar. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan menempatkan perkembangan politik terkini dalam kerangka teoritik yang relevan.

4. Pembahasan

4.1 Konfigurasi Koalisi Besar Pasca-Pemilu 2024

Perkembangan politik pasca-Pemilu 2024 memperlihatkan pembentukan dukungan parlementer yang sangat luas bagi pemerintahan baru. Dengan bergabungnya partai-partai besar ke dalam orbit pemerintahan, peta politik Indonesia bergerak ke arah konsolidasi elite yang makin kuat. Di tingkat kabinet, struktur pemerintahan yang sangat besar—dengan puluhan kementerian dan lebih dari seratus menteri serta wakil menteri—menggambarkan tingkat akomodasi politik yang tinggi.

Dalam perspektif manajemen kekuasaan, konfigurasi ini cukup rasional. Pemerintahan baru membutuhkan dukungan yang kokoh untuk mengimplementasikan agenda besar. Indonesia menghadapi tantangan ekonomi, pangan, investasi, hilirisasi, transformasi birokrasi, dan ketegangan geopolitik global. Pemerintah tentu membutuhkan mesin politik yang mampu meminimalkan veto dari legislatif. Karena itu, menggabungkan partai-partai besar ke dalam koalisi adalah strategi untuk menurunkan risiko kebuntuan.

Namun, secara demokratis, konfigurasi ini menimbulkan dilema. Ketika koalisi menjadi terlalu luas, posisi oposisi formal di DPR menjadi sangat kecil. Dalam kondisi demikian, pengawasan terhadap pemerintah tidak lagi bersandar terutama pada kompetisi antarfaksi di parlemen, melainkan bergantung pada keberanian internal elite, tekanan publik, dan mekanisme nonparlementer.

4.2 Mengapa Koalisi Besar Menarik bagi Elite?

Ada beberapa alasan mengapa koalisi besar begitu menarik bagi elite politik Indonesia.

Pertama, **akses terhadap sumber daya kekuasaan**. Partai yang berada di pemerintahan memperoleh jabatan, pengaruh terhadap kebijakan, dan peluang lebih besar untuk mempertahankan jaringan patronase. Dalam sistem politik yang biaya organisasinya tinggi, akses semacam ini sangat berharga.

Kedua, **reduksi risiko politik**. Berada di luar pemerintahan berarti menghadapi risiko marginalisasi, keterbatasan akses, dan potensi tekanan politik. Oposisi memang memberi ruang diferensiasi, tetapi juga mengandung biaya yang besar.

Ketiga, **budaya politik akomodasionis**. Politik Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan kecenderungan bahwa konflik elektoral sering diakhiri dengan kompromi elite. Setelah kontestasi usai, yang kalah tidak selalu memilih menjadi oposisi total, melainkan berupaya masuk kembali ke dalam struktur kekuasaan.

Keempat, **sistem presidensial multipartai itu sendiri**. Dalam sistem seperti Indonesia, presiden memang memerlukan mayoritas kerja. Karena itu, pembentukan koalisi luas mudah dibenarkan atas nama efektivitas pemerintahan. Problemnya, argumen efektivitas ini kemudian berkembang melampaui kebutuhan minimum dan berubah menjadi logika "semua sebaiknya masuk."

4.3 Manfaat Jangka Pendek Koalisi Besar

Harus diakui bahwa koalisi besar membawa beberapa manfaat nyata.

Pertama, **stabilitas pemerintahan**. Dengan dukungan mayoritas besar di DPR, pemerintah tidak mudah tersandera oleh tarik-menarik politik yang berkepanjangan. Hal ini penting dalam sistem presidensial yang menuntut kesinambungan kebijakan.

Kedua, **kemudahan legislasi dan penganggaran**. Program-program prioritas pemerintah akan lebih mudah disetujui jika mayoritas partai

berada dalam satu barisan. Dari sudut pandang administrasi negara, hal ini meningkatkan kapasitas eksekusi.

Ketiga, **koordinasi pusat-daerah yang lebih mudah**. Jika partai-partai pendukung pemerintah juga kuat di daerah, maka implementasi program nasional berpotensi lebih lancar.

Keempat, **peredaman konflik elite**. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, elite sering memandang akomodasi sebagai cara menjaga harmoni dan menghindari polarisasi tajam.

Manfaat-manfaat ini menjelaskan mengapa koalisi besar tidak bisa begitu saja ditolak secara normatif. Ia memiliki dasar rasional dan fungsional. Masalahnya bukan pada keberadaan koalisi itu sendiri, melainkan pada ukuran, kedalaman, dan efek sampingnya terhadap demokrasi.

4.4 Biaya Demokratis: Kaburnya Oposisi dan Melemahnya Pengawasan

Biaya demokratis dari koalisi besar menjadi nyata ketika fungsi pengawasan parlemen mulai melemah. Secara konstitusional, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tetapi dalam praktik, jika sebagian besar fraksi memiliki kepentingan untuk tetap sejalan dengan pemerintah, fungsi pengawasan cenderung menurun. Kritik internal menjadi mahal, sedangkan loyalitas politik menjadi lebih menguntungkan.

Dalam situasi ini, parlemen berisiko menjadi arena *ratification* alih-alih *deliberation*. Artinya, keputusan pemerintah lebih banyak disahkan daripada diuji secara sungguh-sungguh. Padahal inti demokrasi representatif bukan sekadar persetujuan mayoritas, melainkan pengujian terbuka atas kebijakan publik.

Selain itu, koalisi besar membuat **akuntabilitas menjadi kabur**. Bila hampir semua partai bergabung ke pemerintah, pemilih akan kesulitan

menentukan siapa yang harus dipuji atau dihukum dalam pemilu berikutnya. Kegagalan kebijakan tidak mudah ditelusuri, sebab hampir semua aktor utama terlibat dalam pemerintahan. Di sinilah demokrasi mengalami penurunan kualitas: pemilu tetap ada, tetapi kemampuannya untuk membedakan alternatif kekuasaan melemah.

4.5 Pergeseran Oposisi dari Parlemen ke Luar Parlemen

Ketika oposisi formal mengecil, perlawanan politik tidak hilang; ia hanya berpindah arena. Dalam beberapa tahun terakhir, protes mahasiswa, mobilisasi masyarakat sipil, kritik media independen, dan intervensi pengadilan menunjukkan bahwa ruang koreksi tetap hidup di luar parlemen.

Fenomena ini penting. Ia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya pasif terhadap konsolidasi elite. Ketika ada kebijakan yang dianggap bermasalah, tekanan dapat muncul dari jalanan, kampus, media sosial, atau litigasi konstitusional. Dalam arti tertentu, ini merupakan kekuatan demokrasi Indonesia: masyarakat sipil masih sanggup bereaksi.

Tetapi ada persoalan mendasar di sini. Oposisi ekstra-parlementer tidak sama dengan oposisi institusional. Oposisi di luar parlemen cenderung episodik, bergelombang, dan sering bergantung pada momentum. Ia efektif menolak kebijakan tertentu, tetapi tidak selalu mampu merumuskan alternatif pemerintahan yang konsisten. Dengan demikian, jika oposisi terlalu banyak bergeser ke luar lembaga formal, demokrasi menjadi timpang: keras di ruang publik, tetapi lemah di dalam institusi.

4.6 PDI Perjuangan dan Kemungkinan Oposisi Elektoral

Dalam konteks koalisi besar, posisi PDI Perjuangan menjadi sangat penting. Sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR, PDI-P memiliki kapasitas objektif untuk menjadi inti oposisi parlementer. Jika partai ini

memilih bertahan di luar pemerintahan, ia dapat memainkan setidaknya tiga peran.

Pertama, **sebagai pengawas formal** terhadap kebijakan pemerintah di DPR.

Kedua, **sebagai penampung ketidakpuasan publik** yang membutuhkan saluran politik institusional.

Ketiga, **sebagai alternatif elektoral menuju 2029**.

Namun, peluang ini dibatasi oleh sejumlah faktor. Struktur insentif politik Indonesia cenderung tidak ramah terhadap oposisi keras. Selain itu, popularitas presiden yang tinggi membuat oposisi harus bekerja lebih cerdas agar tidak terlihat sekadar menolak. Oposisi yang berhasil bukanlah oposisi yang hanya bersandar pada retorika, tetapi yang mampu menawarkan kebijakan alternatif yang meyakinkan.

Dalam narasi akademik, partai oposisi yang efektif harus memenuhi tiga syarat: memiliki basis organisasi yang kuat, posisi ideologis atau programatik yang jelas, dan kemampuan membangun hubungan dengan masyarakat sipil. Tanpa ketiga hal itu, oposisi mudah terjebak menjadi simbolik belaka.

4.7 Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peluang Kompetisi yang Lebih Terbuka

Salah satu perkembangan penting yang dapat memengaruhi masa depan oposisi adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan *presidential threshold* inkonstitusional. Secara normatif, keputusan ini berpotensi membuka arena kompetisi yang lebih luas pada pemilu mendatang. Jika partai-partai tidak lagi dipaksa membentuk koalisi besar hanya demi syarat pencalonan, maka peluang diferensiasi politik akan membesar.

Namun, peluang ini tidak otomatis menghasilkan oposisi yang kuat. Tanpa pembenahan pembiayaan partai, demokratisasi internal partai,

dan perlindungan terhadap minoritas parlemen, kompetisi yang lebih terbuka bisa saja hanya menghasilkan lebih banyak kandidat, tetapi bukan oposisi yang lebih substantif. Karena itu, reformasi aturan pencalonan harus diikuti reformasi ekosistem politik secara lebih luas.

4.8 Tiga Skenario Masa Depan Oposisi Indonesia

Berdasarkan pembahasan di atas, setidaknya terdapat tiga skenario yang mungkin terjadi.

a. Skenario kooptasi total

Dalam skenario ini, hampir semua partai besar pada akhirnya masuk atau bersikap lunak terhadap pemerintah. Oposisi parlementer menjadi simbolik, sedangkan kritik utama datang dari masyarakat sipil. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi pengawasan institusional melemah tajam.

b. Skenario oposisi terbatas tetapi fungsional

Di sini tetap ada partai atau blok yang berada di luar pemerintahan dan memilih memainkan peran oposisi yang konsisten pada isu-isu tertentu. Oposisi semacam ini mungkin tidak besar, tetapi cukup untuk menjaga diferensiasi politik dan akuntabilitas minimum.

c. Skenario oposisi hibrida

Dalam skenario ini, oposisi formal di parlemen lemah, tetapi dikombinasikan dengan tekanan kuat dari pengadilan, media, kampus, dan masyarakat sipil. Ini mungkin menjadi pola paling realistis untuk Indonesia dalam jangka pendek. Namun, model ini juga paling rentan terhadap ketegangan karena koreksi terhadap kekuasaan tidak sepenuhnya berlangsung dalam jalur institusional.

4.9 Apa yang Perlu Dibenahi?

Masa depan oposisi tidak cukup diserahkan pada dinamika elite semata. Diperlukan pembenahan kelembagaan yang lebih sistematis.

Pertama, perlu ada **penguatan hak-hak oposisi di parlemen**, misalnya akses terhadap alat kelengkapan, kepemimpinan komite tertentu, atau hak memimpin mekanisme pengawasan strategis. Dalam banyak demokrasi, hak oposisi dijamin agar minoritas tetap punya kapasitas institusional untuk mengontrol mayoritas.

Kedua, perlu ada **perubahan budaya politik**. Oposisi harus dipahami sebagai bagian normal dari demokrasi, bukan sebagai ancaman terhadap persatuan nasional. Dalam sistem demokratis, loyalitas kepada konstitusi justru dapat diekspresikan melalui kritik terhadap pemerintah.

Ketiga, perlu ada **pembenahan insentif politik** agar berada di luar pemerintahan tidak selalu berarti marginalisasi total. Jika semua insentif diarahkan untuk bergabung dengan pemerintah, maka oposisi akan selalu rapuh.

Keempat, perlu ada **penguatan masyarakat sipil dan media independen**. Dalam konteks ketika oposisi parlementer lemah, aktor-aktor ini menjadi penyangga penting demokrasi. Namun idealnya, peran mereka melengkapi parlemen, bukan menggantikan sepenuhnya.

5. Kesimpulan

Koalisi besar dalam politik Indonesia merupakan fenomena yang lahir dari kebutuhan riil sistem presidensial multipartai: kebutuhan akan stabilitas, dukungan legislatif, dan kapasitas eksekusi kebijakan. Dalam konteks tertentu, koalisi besar memang dapat dipahami sebagai strategi rasional dan bahkan fungsional. Ia membantu pemerintah bekerja lebih efektif, mengurangi gesekan elite, dan mempercepat koordinasi pusat-daerah.

Namun, artikel ini menunjukkan bahwa manfaat tersebut datang bersama biaya demokratis yang serius. Ketika koalisi menjadi terlalu dominan, oposisi formal di parlemen melemah, fungsi pengawasan DPR menurun, dan akuntabilitas politik menjadi kabur. Akibatnya, kritik dan koreksi terhadap kekuasaan bergeser ke luar parlemen: ke masyarakat sipil, pengadilan, media, kampus, dan aksi jalanan. Ini menunjukkan bahwa oposisi tidak hilang, tetapi berubah bentuk.

Masa depan oposisi di Indonesia karena itu tidak hanya bergantung pada apakah ada satu atau dua partai yang bertahan di luar pemerintahan. Yang lebih penting adalah apakah sistem politik Indonesia bersedia mengakui oposisi sebagai unsur yang sah dan perlu dalam demokrasi. Demokrasi yang matang bukan demokrasi tanpa konflik, melainkan demokrasi yang mampu melembagakan konflik secara sehat, terbuka, dan konstitusional.

Dengan demikian, agenda pembenahan ke depan bukan sekadar membatasi koalisi besar, melainkan membangun desain kelembagaan yang memberi tempat terhormat bagi oposisi. Hak-hak oposisi di parlemen perlu diperkuat, budaya politik akomodasionis perlu diseimbangkan dengan penghormatan terhadap kritik, dan sistem pemilu perlu didorong agar menghasilkan kompetisi yang lebih nyata. Tanpa langkah-langkah tersebut, Indonesia berisiko memiliki pemerintahan yang kuat secara administratif, tetapi demokrasi yang makin tipis dalam substansinya.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, negara memang membutuhkan stabilitas; tetapi demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar stabilitas. Ia membutuhkan perbedaan yang dilembagakan, kritik yang sah, dan kemungkinan pergantian kekuasaan yang sungguh-sungguh. Di situlah masa depan oposisi Indonesia akan ditentukan.

Daftar Pustaka

Cambridge University Press. (2018). *Party cartelization, Indonesian-style: Presidential power-sharing and the contingency of democratic opposition.*

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). *Tentang DPR: Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.*

ISEAS – Yusof Ishak Institute. (2025). *Power and Opposition under Prabowo's Political Cartel.*

Jambura Law Review. (2025). *The urgency of the right of the opposition in strengthening checks and balances in Indonesia's presidential system.*

Journal of ASEAN Studies. (2024). *Coalitional presidentialism in Indonesia and the management of legislative support.*

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Penetapan hasil Pemilu Legislatif 2024.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Decision declaring the presidential threshold unconstitutional.*

Reuters. (2024a). *Indonesia's president-elect Prabowo secures parliamentary majority.*

Reuters. (2024b). *Prabowo sworn in with a cabinet of more than 100 ministers and deputies.*

Reuters. (2024c). *Power struggle between Indonesia's court and parliament sparks protests.*

Reuters. (2024d). *Prabowo's coalition dominates regional elections, with Jakarta as exception.*

Reuters. (2025a). *Indonesia president gets high approval rating after first 100 days.*

Reuters. (2025b). *Students lead "Dark Indonesia" protests against budget cuts.*

Reuters. (2025c). *Anti-graft body arrests senior opposition official.*

The Jakarta Post. (2026). *PDI-P becomes the sole opponent of indirect regional elections.*

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 27 Februari 2026. Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a0e049-f348-839e-a931-88c684baeaaa>